



Dana Keistimewaan Disparbud Turun

GONDOKUSUMAN -- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta tidak akan memanfaatkan dana keistimewaan untuk mendanai pengembangan seni wilayah pada tahun ini karena kegiatan tersebut sudah dilakukan tahun sebelumnya.

"Sudah tidak ada lagi dana untuk pengembangan seni wilayah. Harapannya, kelompok seni wilayah yang sudah terbentuk tahun lalu sudah bisa mandiri," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta Eko Suryo Maharso di kantornya, Selasa (22/3).

Selain tidak lagi mendanai pengembangan kelompok seni di wilayah, pertunjukan seni dan budaya yang pada tahun lalu digelar di beberapa "artpoint" juga akan dihilangkan.

Total dana keistimewaan yang akan dikelola Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta pada tahun ini tidak akan sebesar dana yang dikelola tahun sebelumnya, yaitu hanya berkisar Rp 4 miliar.

Tahun lalu, total dana keistimewaan yang dikelola Dinas

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta mencapai sekitar Rp 10 miliar, namun hanya bisa direalisasikan sekitar Rp 6 miliar.

Pada tahun ini, sejumlah kegiatan yang akan didanai dengan dana keistimewaan di antaranya adalah rehabilitasi bangunan cagar budaya, serta berbagai kegiatan seni dan budaya seperti Festival Kesenian Yogyakarta dan kegiatan memeriahkan hari ulang tahun Kota Yogyakarta.

"Misalnya saja kegiatan melukis bersama tentang bangunan-bangunan heritage di Yogyakarta. Jika tahun lalu namanya Gelar Maestro Rindu Jogja, maka tahun ini akan diganti menjadi Gelar Talenta Budaya," katanya.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta menargetkan, kegiatan menggunakan dana keistimewaan tersebut sudah bisa dilakukan mulai April karena saat ini masih dalam proses administrasi pencairan dana.

Sementara itu, serapan dana keistimewaan pada tahun lalu oleh Pemerintah Kota Yogyakarta men-

capai 68,52 persen untuk kinerja fisik dan 54,31 persen untuk kinerja keuangan dari total anggaran sebesar Rp 22,9 miliar.

Pada tahun lalu, terdapat setidaknya tujuh program kegiatan dibiayai danais yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta. Persentase serapan tertinggi terdapat pada program pengembangan informasi dan sistem pertanahan dengan serapan fisik 100 persen dan keuangan 76,27 persen dari total anggaran Rp 598 juta.

Sedangkan serapan terendah terdapat pada program kegiatan pengelolaan kekayaan budaya dengan serapan fisik Rp 28,5 persen dan keuangan 13,8 persen dari total dana Rp 5,2 miliar.

"Program kegiatan itu berhubungan dengan pembelian bangunan cagar budaya. Karena tidak terjadi kesepakatan dengan pemilik bangunan, maka kegiatan itu tidak bisa direalisasikan sehingga mempengaruhi serapan anggaran," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta Edy Muhammad. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005